



BUPATI SAMPANG

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

TANGGAL: 31 Juli 2024

NOMOR : 065/ 21 /434.100/2024



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Rajawali No. 36 Telp/Fax. (0323) 321053

Email: itda@sampangkab.go.id website: <https://itkab.sampangkab.go.id>

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024**

Nomor : 065/ 21 /434.100/2024
Tanggal : 31 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sampang
Tahun : 2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Sampang Nomor 100.3.3.2/295/KEP/434.013/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (*empat*) komponen besar manajemen kinerja meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Adapun lingkup evaluasi AKIP mencakup:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP;
 - e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang

			sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.
4.	B	>60-70	Baik , terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan pada level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai) , terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang , sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, memperoleh nilai sebesar **75,35** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Hal ini menggambarkan bahwa AKIP sangat baik pada unit kerja utama namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2023	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024
a	Perencanaan Kinerja	30 %	24,59	24,78
b	Pengukuran Kinerja	30 %	17,96	18,79
c	Pelaporan Kinerja	15 %	11,95	11,95
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	16,41	19,84
e	Capaian Kinerja	0 %	0,00	0,00
J u m l a h		100 %	70,91	75,35

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi).

5. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan berkelanjutan (sustainability) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah sesuai dengan ketentuan namun belum direviu menggunakan inovasi

B. Pengukuran Kinerja

- 1) Belum ada definisi operasional pada IKU
- 2) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah disajikan dan mengungkap informasi kinerja

D. Evaluasi Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi

6. Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang agar melakukan beberapa hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah sesuai namun diperlukan inovasi untuk meriviu renstra sehingga bisa terus berkesinambungan

B. Pengukuran Kinerja

Meriviu IKU dengan menambahkan penjelasan definisi operasional

C. Pelaporan Kinerja

Dokumen laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realiasi kinerja dengan di level nasional

D. Evaluasi Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang disajikan menggunakan teknologi informasi

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pit. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19751012 199901 1 002

TIM EVALUATOR :

1. Pengarah

Abdul Syakur, SH., M.Si

NIP.19680201 199803 1 006.....

2. Pengendali Teknis

Kamilia, M. Psi, Psikolog

NIP.19770324 200604 2 023

3. Ketua

Moh. Ali Majdi, SH.,MM

NIP. 19760721 201001 1 006.....

4. Evaluator

Budi Hartono, S. Sos

NIP. 19721217 199603 1 003.....